

# PEMBENTUKAN LEMBAGA LUMBUNG DESA DI GROBOGAN PADA AWAL ABAD XX

Endah Hartatik

Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro

---

## ABSTRACT

*Grobogan was regency directly ruled by Dutch Colonial government. At that time this regency was identified as a poor region. The poverty was mainly caused by unstable food supply. The aim of this research is to describe village economy institution in forming Village Barn as a tool for creating stability in food supply. The research focused on Grobogan regency, Central Java in the early of the 20th century. This research used historical sources especially the secondary ones in the form of monograph and other printed sources. The research found out that before establishing Village Barn Institution, the condition of Grobogan people was under instability of food supply. But then, after Village barn was formed, the condition of instability in food supply ended. In conclusion, the Forming of Village Barn influenced the food supply stability. So, it is strongly suggested that Village Barn can be revitalized again nowadays.*

*Key word: village barn, food supply, poverty, stability, instability, institution*

## ABSTRAK

*Grobogan adalah Kabupaten yang secara langsung diatur oleh pemerintah Kolonial Belanda. Pada waktu itu Kabupaten ini diidentifikasi sebagai satu daerah lemah. Kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh persediaan makanan yang tidak stabil. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan institusi ekonomi desa berupa pembentukan Lumbung Desa sebagai satu alat untuk menjaga ketahanan pangan. Penelitian yang difokuskan di Grobogan, Jawa Tengah pada awal 20 abad. Penelitian ini menggunakan sumber historis dan sumber sekunder berupa monograf dan sumber tercetak yang lain. Hasil penelitian menunjukkan sebelum mendirikan Institusi Lumbung Desa, kondisi orang-orang Grobogan di bawah ketidakstabilan dari barang persediaan makanan. Akan tetapi, setelah Lumbung Desa dibentuk, kondisi ketidakstabilan di barang persediaan makanan berakhir. Kesimpulannya, Pembentukan Lumbung Desa mempengaruhi kemantapan barang persediaan makanan. Sehingga, betul-betul disarankan bahwa Lumbung Desa dapat direvitalisasi kembali pada saat ini.*

*Kata kunci: Lumbung desa, persediaan makanan,*

---

## PENDAHULUAN

Wilayah Grobogan sejak dahulu merupakan daerah yang rentan terhadap krisis pangan. Pada tahun 1849-1850 terjadi peristiwa kelaparan yang cukup dahsyat. Kelaparan itu disebabkan bencana alam berupa banjir dan beban kerja akibat tanam paksa serta pajak yang tinggi. Akibatnya, banyak penduduk yang pindah ke wilayah lain

(Supriyono, 1987: 125; Hartatik, 2002: 75-76).

Pada masa pemerintah kolonial Belanda dipegang oleh golongan Liberal terjadi lagi krisis pangan. Tahun 1872 di wilayah ini terjadi peristiwa kelaparan massal. Kelaparan disebabkan kegagalan panen akibat banjir dan serangan hama penyakit. Penduduk desa yang umumnya miskin semakin berat beban hidupnya karena rata-rata luas lahan

pertanian relatif kecil, beban pajak berat, dan banyaknya tuntutan akan penyerahan tenaga kerja untuk penguasa dan desa (Suryo, 1989: 150).

Pemerintah Kolonial Belanda sebenarnya telah berusaha mengatasi persoalan pangan dari penduduk pedesaan di wilayah ini. Salah satu usaha yang menonjol adalah pembangunan sarana irigasi. Proyek irigasi yang terbesar adalah proyek Tuntang. Pada tahun 1875 proyek ini telah selesai dan berhasil mengalirkan air ke sawah-sawah petani.

Meskipun terdapat sejumlah usaha pemerintah kolonial untuk mengatasi krisis pangan, namun bencana kelaparan kembali terjadi pada tahun 1887 dan 1901. Diceritakan bahwa pada tahun 1887 penduduk Grobogan tidak sanggup lagi untuk makan sehari dua kali meskipun diselingi dengan makan jagung, ubi, dan singkong. Mereka yang tidak memiliki lahan pertanian digambarkan banyak yang mengais makanan di sepanjang jalan. Bahkan banyak yang meninggal akibat kelaparan (*Verslag over den Waters en Voedingsnood in de Residentie Semarang*, 1902).

Kelaparan endemik di wilayah Grobogan terutama disebabkan kombinasi bencana banjir, kekeringan, dan penyakit tanaman. Bencana banjir terjadi pada musim hujan terutama melanda wilayah persawahan yang berbatasan dengan Kabupaten Demak. Bencana kekeringan terjadi pada musim kemarau baik di wilayah persawahan maupun tegalan. Penyakit tanaman yang menyerang tanaman padi antara lain *sundep*, *tikus*, *beluk*, dan *mentek* (*Verslag over den Waters en Voedingsnood in de Residentie Semarang*, 1902: 45).

Pemerintah Kolonial kembali mencoba menangani secara komprehensif persoalan krisis pangan itu. Salah satu usahanya adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan melalui

pendirian lumbung desa. Lumbung desa pertama di Kabupaten Grobogan didirikan di Distrik Kradenan pada bulan Februari 1902. Tujuan pendirian Lumbung Desa ini untuk melindungi petani dari para *pengijon* yang dilakukan oleh para rentenir (lintah darat) yang umumnya pedagang Cina dan pribumi kaya (TBB, 1905: 336-337). Artikel ini mengupas sistem lumbung desa yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda di Grobogan dan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan di pedesaan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field work*). Fokus penelitian ditujukan untuk melacak sejarah lumbung desa di Grobogan pada masa kolonial. Lokasi penelitian di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Museum Sono Budoyo Yogyakarta, Perpustakaan Yayasan Hatta (*Hatta Foundation*) Yogyakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional Jakarta, dan situs internet.

Penelitian historis mengikuti prosedur yang berlaku dalam penelitian sejarah, yakni penelusuran sumber (heuristik), penilaian sumber (kritik), interpretasi, dan historiografi. Penelusuran sumber dipandu dengan katalog dan dilacak di sejumlah tempat sumber sejarah sebagaimana tersebut di atas. Penilaian sumber ditujukan untuk mencari otentisitas dan kredibilitas sumber. Interpretasi ditujukan untuk memahami makna dan mencari keterkaitan informasi dalam sumber.

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang lumbung desa menurut ingatan masyarakat. Penelitian lapangan ditem-

puh dengan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion* atau FGD), pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Lokasi penelitian lapangan di wilayah Kabupaten Grobogan yang dahulu pernah berkembang lumbung desanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sebab-sebab Munculnya Lumbung Desa

Munculnya lembaga Lumbung Desa di Grobogan didasari pada kenyataan bahwa kegiatan pasca panen bagi penduduk *Afdeeling* Grobogan sampai awal abad XX cukup memprihatinkan. Berdasarkan laporan kontrolir Wirosari (*Jonquiere*) diperoleh gambaran bahwa pada tahun 1900, kondisi kehidupan masyarakat sangatlah memprihatinkan. Keadaan tersebut dapat dilihat dari ketidakberdayaan penduduk di daerah Wirosari dan sekitarnya yang dengan bebas menjual hasil panennya kepada pedagang Cina tanpa mempertimbangkan menyisakan hasil panen guna kebutuhan musim tanam berikutnya.

Penjualan hasil panen penduduk digunakan untuk membayar hutang dan pajak serta kebutuhan lainnya dengan harga yang relatif tidak menguntungkan karena sudah terikat hutang kepada "lintah darat" Eropa, Cina, kepala desa dan orang kaya dengan bunga 200-300 %. Cara hidup yang demikian menjadikan petani jarang yang mempunyai simpanan padi guna mengantisipasi musim *paceklik* (*Tijdschrift TBB*, 1903: 35).

Kondisi krisis pangan itu dilaporkan oleh Asisten Residen Grobogan W.F Lutter tahun 1905. Berdasarkan laporan yang dihimpun diperoleh informasi bahwa pada tahun 1899-1901 *Af-*

*deeling* Grobogan mengalami krisis pangan yang sangat hebat. Krisis pangan diakibatkan oleh bencana baik banjir maupun kegagalan panen.

### Pembentukan Lumbung Desa

Pemerintah lokal berusaha mengantisipasi kemerosotan ekonomi penduduk dengan jalan melarang perdagangan padi secara besar-besaran. Usaha pencegahan penjualan padi secara besar-besaran dapat dilihat dari hasil notulen rapat bulanan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. *Pertama*, perintah dari Residen Semarang (tanggal 10 Juli 1901) yang ditujukan kepada pejabat pribumi untuk mencegah penjualan padi secara besar-besaran yang dipelopori oleh pemimpin di wilayah Demak dengan menyisihkan 9000 bahu padi penduduk yang tidak dijual.

*Kedua*, tanggal 7 Desember 1901 dilakukan perintah untuk membuka lumbung padi di *Afdeeling* Grobogan yang berfungsi sebagai tempat penimbunan padi.

*Ketiga*, pada waktu pembukaan lumbung desa di Krubun tanggal 8 Januari 1902, pemerintah mencanangkan setiap onder distrik harus mempunyai lumbung desa.

*Keempat*, pemerintah memutuskan supaya perdagangan padi kepada orang Cina dibatasi. Pembatasan tersebut dilakukan karena pemerintah memandang pembelian padi oleh orang-orang Cina merupakan penyebab utama kemunduran kondisi ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Guna merealisasikan tujuan tersebut, penguasa lokal di Distrik Kradenan membuka lumbung desa di beberapa tempat pada bulan April sewaktu petani melakukan panen. *Kelima*, 12 April 1902 pemerintah mencari sarana yang sah bagi pencegahan pem-

borongan padi secara besar-besaran. Realisasi pembukaan lumbung padi dilaksanakan di Distrik Kradenan pada bulan Februari 1902, sementara di daerah-daerah lain di *Afdeeling* Grobogan baru dilaksanakan pada bulan April 1902 (TBB, 1905: 336-337).

Pembatasan penjualan padi secara bebas yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memberantas sistem *ngijon* yang dilakukan para rentenir. Laporan kontrolir Wirosari pada kuartal keempat tahun 1900 menyebutkan bahwa lembaga baru yang berbentuk lumbung desa tersebut pada awal berdirinya ditanggapi sinis dan acuh oleh penguasa pribumi yang mempunyai sifat malas, terlebih-lebih oleh para pedagang yang merasa keberatan. Sementara itu para petani menanggapi dengan sikap acuh. Dengan pembukaan lumbung desa tersebut orang-orang kaya dan pedagang Cina merasa kedudukan dan usahanya terancam.

Dalam laporan kontrolir tersebut juga disebutkan bahwa pemilihan lokasi awal terbentuknya lumbung desa di Distrik Kradenan atas pertimbangan sebagai berikut: (1) kepala distrik pada saat itu merupakan pejabat satu-satunya yang aktif dan pemimpin yang mau menerima serta mengetahui manfaat dari lembaga baru tersebut, (2) banyaknya para kepala desa yang tidak dapat dipercaya berhubungan dengan usaha-usaha pengentasan kemerosotan kesejahteraan penduduk, (3) sedikitnya hasil surplus padi petani yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup apabila tidak dilakukan penyimpanan.

Kondisi *Afdeeling* Grobogan khususnya tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 1902 digambarkan oleh W.F. Lutter dalam keadaan "darurat", dimana penduduknya banyak yang meninggal karena terjangkitnya wabah kolera, demam, kegagalan panen dan ternak-ternak banyak yang mati

akibat diserang penyakit. Lutter yang menjadi Asisten Residen Grobogan pada tanggal 28 April 1902 menggantikan pejabat sebelumnya yang mengambil cuti ke negeri Belanda, menyatakan bahwa penduduk *Afdeeling* ini sebagian besar terdiri atas para petani kecil atau *wong cilik* kondisi hidupnya sangatlah memprihatinkan karena mereka hampir semuanya tidak bisa makan. Guna mengantisipasi keadaan yang demikian, pemerintah menyediakan bantuan bahan pangan kepada penduduk.

Bantuan pangan ini disalurkan oleh pemerintah secara langsung kepada petani. Berdasarkan data yang ditemukan, kegagalan panen padi yang dialami oleh para petani pada tahun 1902 dari lahan sawah seluas 56.077 *bahu* sebesar hampir sepertiganya (18.450 *bahu*). Kondisi tersebut mengakibatkan penduduk *Afdeeling* Grobogan kehilangan semangat bekerja dan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka (krisis kepercayaan).

Guna menghadapi keadaan tersebut, asisten residen yang baru membuat rencana kerja utama yang harus dilakukan dalam waktu dekat yaitu mengembalikan kepercayaan penduduk terhadap pemimpinnya, selain usaha-usaha lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Langkah pertama yang dilakukan Lutter adalah menyediakan bahan pangan bagi penduduk di *Afdeeling* Grobogan.

Pelaksanaan penyerahan padi ke lumbung desa yang ada di Distrik Kradenan oleh pemerintah diatur dalam *Bijblad* No. 1749 tahun 1902. Dalam keputusan tersebut diatur ketentuan penyerahan padi antara lain: dalam satu *bahu* sawah, petani harus menyerahkan 1 *pikul* padi untuk benih padi, 1 *pikul* untuk modal penggarap sawah dan 1 *pikul* untuk cadangan kebutuhan dalam musim paceklik. Adapun pembangunan fisik lumbung desa dilakukan secara

gotong-royong di antara warga desa dengan cara penebangan pohon Johar yang ada di sepanjang jalan untuk membuat kerangka bangunan. Penebangan tersebut dilaksanakan karena permintaan kayu jati kepada negara tidak dikabulkan. Bagian lantai dan dinding dari bangunan lumbung desa terbuat dari bahan bambu, sedangkan atap lumbung menggunakan genting atau daun kelapa.

Berdasarkan data yang ada, keberadaan lumbung desa di *Afdeeling* Grobogan hingga bulan Juni 1902 tercatat sejumlah 200 buah bangunan lumbung desa. Berdasarkan kesepakatan warga, bangunan itu ditempatkan dalam satu kawasan dengan rumah kepala desa dengan alasan untuk menjaga keamanan.

Pelaksanaan penyeteroran padi ke lumbung oleh petani dilakukan dengan cara diikat dan diberi tanda khusus dari kertas, atau daun jagung yang diberi warna tertentu. Padi yang akan disetorkan ke lumbung terlebih dahulu dikeringkan selama 14 hari, di halaman rumah kepala desa/lurah. Cara tersebut dilakukan karena padi yang akan diserahkan ke lumbung desa banyak mengandung kadar air/basah. Cara penyeteroran padi ke lumbung oleh Asisten Residen Wirosari dianggap menyulitkan pada waktu proses pengembalian kepada petani, karena tanda-tanda tersebut hanya dapat dikenali oleh pemiliknya bukan pengurus lumbung.

Asisten Residen Lutter menganjurkan supaya penyerahan padi yang dilakukan ke lumbung desa mencontoh cara di Desa Tanjungsari dan Wirosari. Para petani di kedua tempat tersebut menyerahkan padinya ke lumbung desa dengan terlebih dahulu memberi tanda dengan *welat* bambu yang diberi nomor petani menurut daftar lumbung di tengah ikatan (*gedeng*) padi. Daftar lumbung dibuat sesederhana mungkin den-

gan menggunakan huruf dan berbahasa Jawa. Oleh asisten residen cara-cara tersebut diharapkan digunakan pula pada lumbung-lumbung di seluruh *Afdeeling* Grobogan. Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh lurah/kepala desa, asisten residen memerintahkan untuk melengkapi pintu lumbung dengan membuat tiga kunci. Kunci pertama dipegang oleh lurah, kunci kedua dipegang oleh salah seorang tetua atau orang kaya di desa dan kunci ketiga disimpan oleh kepala *onder distrik*.

Penerimaan padi dari petani ke lumbung desa biasanya dilakukan setelah panen tiba, dengan terlebih dahulu diberi tanda khusus sesuai dengan daftar lumbung dan nomor petani. Pemasukan padi ke lumbung desa dilaksanakan di bawah pengawasan dan kesaksian wedana atau asisten wedana dan pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, misalnya mantri pertanian atau juru tulis. Tugas pejabat pemerintah tersebut adalah meneliti kembali ikatan padi yang disetorkan petani sesuai dengan daftar lumbungnya. Daftar tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh seorang juru tulis desa. Daftar tersebut antara lain terdiri atas nomor urut petani, nama petani penyeteroran dan jumlah *gedeng* padi yang disetorkan.

Setelah penelitian usai, padi yang disetorkan tersebut dibawa ke lumbung dan pintu lumbung kemudian dikunci dengan disaksikan oleh seluruh warga desa. Kunci-kunci tersebut kemudian diserahkan kepada pejabat yang telah ditetapkan.

Pembagian bibit padi kepada petani dilaksanakan dengan terlebih dahulu menentukan waktu pembagian. Pembagian harus dihadiri oleh pejabat yang terkait dengan menyisihkan sejumlah padi sesuai dengan ikatannya guna memudahkan pemeriksaan. Setelah dirasa cocok maka padi tersebut ke-

mudian diserahkan kepada petani yang bersangkutan.

Pembagian padi kepada petani selama satu tahun dilaksanakan sebanyak 7 kali. Oleh karena jumlah desa yang ada di *Afdeeling* Grobogan cukup banyak yaitu 363 desa, maka pengawasan para pejabat pribumi terhadap lumbung desa di wilayahnya cukup merepotkan. Guna mengantisipasi keadaan yang demikian, Residen Grobogan memutuskan untuk mengangkat seorang mantri lumbung pada setiap distrik di *Afdeeling* ini. Lutter juga melaporkan bahwa penyelewengan dan pelanggaran terhadap padi yang dikumpulkan di lumbung desa tidak diketemukan.

Berdasarkan data yang ditemukan pada tahun 1902, di *Afdeeling* Grobogan terjadi kegagalan panen. Kegagalan tersebut meliputi lahan sawah seluas 18.450 bahu dan lahan yang tertanami seluas 2.033 *bahu*. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut asisten residen mengizinkan pengunduran penimbunan bibit padi ke lumbung. Penimbunan tersebut terutama diperuntukan bagi semua petani. Bagi mereka yang mengalami gagal panen, maka dalam rangka mengganti penyerahan sejumlah padi ke lumbung dilakukan dengan cara istri atau anak petani tersebut menjadi buruh potong padi di lahan petani lain yang tidak mengalami kegagalan.

Selama tahun tersebut penimbunan padi di lumbung sudah menghasilkan bibit sebesar 105.933 *pikul*. Jumlah padi yang dikumpulkan di lumbung tersebut sangat bermanfaat bagi bibit padi pada tahun-tahun mendatang. Usaha yang dilakukan tersebut pada awalnya tidak mendapatkan kepercayaan, akan tetapi setelah hasilnya kelihatan, penduduk kemudian berubah sikap. Perubahan sikap tersebut sebagai akibat mereka tidak lagi harus mencari pinjaman bibit padi kepada orang-orang Cina atau lintah darat akan tetapi me-

lalui lumbung desa.

Dengan melihat hasil pendirian lumbung padi yang prospeknya bagus di wilayah *Afdeeling* Grobogan, asisten residen pada tahun 1903 melakukan usaha kredit ternak untuk mengerjakan sawah bagi para petani. Usaha tersebut dilakukan karena banyak petani di *Afdeeling* Grobogan kekurangan ternak untuk mengerjakan sawah. Ternak untuk membajak di daerah ini mengalami penurunan sebagai akibat munculnya penyakit dan dijual oleh pemiliknya untuk membayar pajak. Harga kredit kerbau seharga f 40 per ekor dan harus dibayar petani sekali angsuran f 5 selama delapan tahun. Pembayaran kredit ternak ini dilakukan oleh petani setiap habis panen. Pembayaran kerbau dengan padi seharga f 5 dikumpulkan ke dalam lumbung terpisah yang letaknya bersebelahan dengan lumbung desa yang sudah ada. Selama tahun 1903 padi yang dikumpulkan di lumbung-lumbung yang ada di *Afdeeling* Grobogan mencapai 164.750 *pikul*, dengan rincian untuk pembayaran kredit kerbau sebesar 11.036 *pikul* atau f 47.366,50, sedangkan sisanya merupakan hasil dari penimbunan padi untuk bibit.

Asisten Residen Grobogan mengambil suatu kebijakan guna mengantisipasi keterlambatan pembayaran pajak oleh petani pada tahun 1904 dengan memperluas aktivitas kegiatan lumbung desa. Perluasan tersebut dilakukan dengan cara petani diharuskan menyisihkan hasil panennya sebesar satu *pikul* padi per bahu untuk membayar pajak tanah sawah dan tegalan di lumbung desa. Harga satu *pikul* padi pada saat itu sebesar f 125-150, akan tetapi karena musim panen harga padi tersebut turun f 3-3,5.

Pajak tanah yang dikenakan kepada petani perbahunya sebesar f 250. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 200 lumbung desa yang ada di *Afdeeling*

ini pada tahun 1904 menyimpan padi sebanyak 236.828 *pikul* padi. Jumlah tersebut dengan perincian 22.654 *pikul* merupakan hasil pembayaran kredit kerbau, 67.923 *pikul* untuk pajak tanah dan sisanya digunakan oleh petani untuk bibit.

### Dampak Lumbung Desa terhadap Ketahanan Pangan

Setelah diterapkan sistem lumbung desa, kekurangan bahan makanan dan kegagalan memperoleh bibit padi tidak pernah terjadi lagi. Setelah musim tanam padi usai, para petani di wilayah *Afdeeling* Grobogan banyak yang menanam lahan sawahnya dengan berbagai macam jenis tanaman kedua, misalnya jagung, kedelai, ketela pohon dan lain sebagainya. Tanaman kedua tersebut oleh petani sering dijual untuk membayar kredit ternak maupun membayar kekurangan pajak. Akan tetapi pada tahun 1904 Asisten Residen Grobogan memberikan laporan bahwa banyak sekali tanaman kedua yang berupa jagung mengalami kegagalan panen di hampir 1/3 lahan yang ada. Kegagalan panen tanaman kedua tersebut mendorong asisten residen mengambil kebijakan meminta pemerintah menunda pembayaran kredit ternak beberapa bulan untuk mencukupi kebutuhan hidup penduduk.

Meskipun dilakukan usaha untuk mengantisipasi keadaan penduduk di hampir seluruh Jawa dan Madura dalam menghadapi keadaan "darurat" (kegagalan panen dan bencana alam), tetapi tidak semua warga desa berhasil menyesuaikan antara penghasilan dan pengeluarannya serta memiliki jaminan sejumlah uang tunai guna membayar pajak dan kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan hidup penduduk tersebut meliputi makan, selamatan,

pakaian, dan lain sebagainya, yang sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kebutuhan tersebut bisa terpenuhi apabila mereka mendapatkan hasil panen yang melimpah. Apabila petani mengalami kegagalan panen, maka ada kecenderungan mereka lari kepada rentenir atau lintah darat yang dapat menyediakan kebutuhannya, akan tetapi dengan konsekuensi pembayaran yang besar dan sangat ditentukan oleh pihak rentenir (Hartatik, 2002).

Dalam berbagai kasus banyak sekali penduduk desa terlibat hutang, baik berupa uang dan barang dalam menghadapi kebutuhan hidup. Petani biasanya membuat kesepakatan yang oleh de Wolff dibagi dalam beberapa kriteria, yaitu: (1) jual mutlak/lepas, jual beli hak milik dimana barang yang menjadi alat tukar tersebut beralih menjadi milik pemberi kredit, (2) jual akad, penggunaan hasil untuk jangka waktu tertentu dan berkewajiban untuk menebus barangnya kembali yang dalam kontrak, sering juga disebut sebagai jual gadai, (3) jual *tutung/lanja*= *nutunkeun*, meyewa tanah garapan dalam jangka waktu panjang dengan pembayaran sewa di muka.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan melihat kondisi ekonomi petani yang semakin lama semakin tercekik oleh hutang kepada para kreditur, pemerintah mengeluarkan larangan riba bagi para rentenir, baik orang pribumi, Cina, Arab, dan Eropa. Larangan tersebut dimuat dalam Lembaran Negara No. 542 tahun 1908.

Tujuan pelarangan riba adalah untuk membebaskan penduduk dari para lintah darat. Pengaruh larangan pemerintah tersebut dalam 10 tahun berikutnya dapat dilihat dari keberhasilan perkembangan lembaga kredit di hampir setiap *Afdeeling* baik yang berupa bank *Afdeeling*, bank desa maupun lumbung desa. Berdasarkan lapo-

ran Komisi Kemunduran Kemakmuran tahun 1912 lewat kantor Inspeksi Perkreditan Rakyat disebutkan bahwa sampai dengan September 1910 lembaga kredit berupa bank *Afdeeling* berjumlah 71 buah dengan jumlah modal sebesar f 7.083.000 termasuk di dalamnya berupa tabungan sebesar f 337.000, deposito dari orang Eropa dan pribumi sebesar f 435.000, dan sisanya merupakan modal dasar serta bunga yang telah diterima.

Jumlah pinjaman yang tidak terlunasi dan diserahkan kembali kepada penduduk di Jawa dan Madura sampai laporan tahun buku 1909-10 sebesar f 6.264.000 dari jumlah pinjaman sebesar f 7.263.000. Sedangkan jumlah lumbung desa yang berhasil didirikan di Jawa dan Madura sejumlah 12.800 buah dengan persediaan padi sejumlah 2.847.000 *pikul*, yang dipinjamkan berjumlah 874.000 *pikul* dan uang tunai sebesar f 1.242.000. Jumlah bank desa di Jawa dan Madura sampai akhir bulan Desember 1910 berjumlah 865 buah dengan modal kerja sebesar f 521.000, termasuk di dalamnya tagihan penduduk sebesar f 148.000 dengan simpanan di bank sebesar f 233.000.

Lembaga kredit lain yang turut membantu menawarkan uang bagi kebutuhan penduduk adalah keberadaan rumah gadai pemerintah. Berdasarkan laporan dinas pegadaian pemerintah selama tahun 1910, jumlah rumah gadai yang didirikan di Jawa dan Madura berjumlah 165 buah. Hingga tahun 1912 ada penambahan rumah gadai pemerintah menjadi 325 buah yang tersebar di beberapa karesidenan di Jawa dan Madura. Salah satu contohnya adalah 29 buah di Keresidenan Surabaya dan 10 lainnya di Keresidenan Besuki. Keberhasilan rumah gadai pemerintah menjadi landasan bagi pendirian rumah gadai berikutnya. Jumlah barang jaminan yang tidak ditebus secara rutin terus meningkat, tahun 1908-10 jumlah

jaminan yang tidak ditebus untuk kriteria A prosentasenya adalah 99%, 89,7% dan 89,2%. Lembaga lain yang didirikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi penduduk adalah dibukanya bank daerah, bank desa dan lumbung desa yang menawarkan kesempatan untuk menabung maupun meminjam uang terutama bagi rakyat kecil (Hartatik, 2002).

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, secara eko-geografis, wilayah Grobogan merupakan daerah kering, sehingga sering terjadi kelaparan dan kekurangan pangan. *Kedua*, pemerintah kolonial dan pribumi pada tingkat lokal telah berusaha mengatasi persoalan kondisi alam Grobogan yang tidak bersahabat dengan kebijakan irigasi dan pembangunan infrastruktur lain, tetapi tidak mampu memecahkan masalah kekurangan pangan dan kelaparan. *Ketiga*, melalui kebijakan pembentukan sistem lumbung desa, persoalan rawan pangan di wilayah Grobogan selama abad ke-20 dapat diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartatik, Endah Sri. 2002. "Penanggulangan Kemiskinan di *Afdeeling* Demak dan Grobogan 1900-1930". *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Supriyono, Agus. 1987. "Krisis Subsistensi di Keresidenan Semarang Kasus Kelaparan di *Afdeeling* Demak dan Grobogan Tahun 1849/50". *Tesis*. Pascasarjana UI.

Suryo, Djoko. 1989. *Sejarah Sosial Pedesaan Keresidenan Semarang 1830-1900*. Yogyakarta: PAU UGM.  
*Tijdschrift voor Binnenlandche Bestuur (TBB)*, 1905.

*Verslag over den Waters en Voedingsnood in Residentie Semarang, 1902* Uitgebracht door de Commissie, ingesteld bij Gouvernements Besluit dd. 2 Juli 1902, no. 8, Eerste Gedeelde, Buitenzorgsche Drukkerij, 1903.